



Kajari Konsultasi ke BPK



■ Lira: Banyak Korupsi Tak Tersentuh

”Tak mungkin kita grasak grusuk, tanpa penyelidikan. Ibarat mulutmu harimau mu. Kita berhati-hati menangani kasus.”

MOCH DJUMALI

Kepala Kejaksaan Negeri Sintang SINTANG, TRIBUN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang, Moch Djumali, akhirnya mengambil kebijakan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dugaan kasus korupsi di Kabupaten Sintang.

Kajari Moch Djumali menepis ungkapan yang mengatakan adanya perioritas utama dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi. Menurut Djumali, semua kasus mendapatkan prioritas utama,



TRIBUNHAR

TRIBUNHAR

sehingga tak ada kesan hanya kasus korupsi di Melawi saja yang diungkap.

”Saat ini saya sedang di Pontianak, lagi konsultasi dengan BPK terkait masalah rumah sakit rujukan, dan rumah sakit lainnya termasuk dugaan korupsi pembangunan pasar di Sintang. Dan saya juga konsultasi dengan BPKP tentang dugaan korupsi Nice,” kata Djumali, melalui ponselnya, Senin (13/5).

Kajari menjelaskan, Sintang dan Melawi menjadi wilayah kerjanya, dan semua kasus ditangani secara berimbang dan mendapatkan perlakuan yang sama. Namun untuk dugaan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Sintang, pihaknya masih dalam tahap penyelidikan.

”Tak mungkin kita grasak grusuk, tanpa melalui penyelidikan mendalam. Ibarat pepatah mulutmu harimau mu, makanya kita juga berhati-hati dalam menangani kasus,” tukasnya.

Mengenai dugaan kasus korupsi Gedung DPRD Sintang, Djumali menjelaskan kasus tersebut saat ini masih ditangani Polres Sintang.

Diam di Tempat

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) mempertanyakan kinerja Kejari Sintang. Pasalnya, sejumlah kasus korupsi, diduga ”diam di tempat”.

”Jangan jauh-jauh, bangunan gedung DPRD dan rumah sakit rujukan itu sudah jelas. Kenapa tak disentuh, malah kasus korupsi di Melawi yang digembar gemborkan. Ada apa ini?,” tukas Presiden Lira, Abdul Hadi, Senin (13/5).

Abdul Hadi menyatakan kasus korupsi di Kabupaten Sintang cukup besar, akan tetapi penanganan oleh Kejari Sintang dinilainya tak serius.

Menurutnya, penanganan kasus korupsi seakan tak berimbang. Selama ini

”Kalau saya mengatakan bukan rumah sakit rujukan, akan tetapi blusukan. Masalahnya belum selesai dibangun, namun sudah rusak”

ABDUL HADI

Presiden Lira

hanya kasus korupsi di Melawi yang ditangani, sementara di Sintang seolah ada pembiaran.

”Ia memaklumi wilayah kerja Kejari meliputi dua kabupaten, Sintang dan Melawi. Namun ia meminta tak hanya satu daerah yang diurusi, hingga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.”

”Ibaratnya yang jauh dikejar, sementara di depan mata dibiarkan. Jelas ini menimbulkan pertanyaan masyarakat,” katanya.

Ia meminta semua kasus ditindak lanjut, seperti kasus pembangunan gedung DPRD yang memakan dana puluhan miliar namun tak kunjung selesai, dan pembangunan rumah sakit rujukan yang juga diduga bermasalah.

”Kalau saya mengatakan bukan rumah sakit rujukan, akan tetapi rumah sakit blusukan. Masalahnya belum selesai dibangun, namun bangunannya sudah banyak yang rusak. Silahkan dicek semua,” katanya.

Abdul Hadi mengharapkan keberadaan Kejari Sintang betul-betul dapat mengungkap tindak korupsi dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang ada di Kabupaten Sintang.

Kapolres Sintang, AKBP Oktavianus Marthin, mengungkapkan pihaknya masih terus mendalami adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Sintang.

”Saat ini masih dalam penyelidikan dan pengumpulan data di lapangan, dan masih perlu pendalaman lebih lanjut. Selain itu kita juga fokus dengan dugaan korupsi lain seperti proyek pengerjaan jalan dan proyek pengadaan air bersih,” kata Kapolres.

Menurutnya, 2013 ini ada empat proyek di Kabupaten Sintang yang diselidiki, lantaran terindikasi korupsi. Keempat proyek tersebut merupakan proyek fisik. (acu)

Kritik Wajar

KETUA Komisi 1 DPRD Sintang, Ginidie, mengungkapkan kritikan terhadap kinerja Kejari Sintang mengenai penanganan dugaan kasus korupsi itu wajar-wajar saja. Termasuk mempertanyakan mengapa kasus tersebut tak diungkap.

”LSM, ormas, media, maupun masyarakat semua memiliki hak menyikapi permasalahan dugaan korupsi tersebut. Bila memiliki data dan bukti, laporkan baik ke kejaksaan maupun kepolisian,” tandas Ginidie.

Menurutnya, bila memang

ditemukan adanya indikasi korupsi, maka kejaksaan harus menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Secara pribadi ia sendiri mengaku pernah mendiskusikan permasalahan dugaan kasus korupsi di Sintang, akan tetapi memang terkendala masalah pembuktian.

”Makanya saya katakan bila memang menemukan adanya indikasi korupsi, laporkan. Siapapun boleh asal. Lengkap dengan bukti sehingga tak ada alasan lagi untuk tak ditindaklanjuti,” pungkas Ginidie. (acu)

Tak Transparan

KETUA Kontak Rakyat Borneo Kalimantan Barat, Lutharif, mengatakan, banyaknya dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Melawi adalah karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBD daerah.

”Ini termasuk salah satu dampak otonomi daerah, yakni pelimpahan kekuasaan namun tidak dibarengi dengan transparansi dalam penggunaan APBD dan akuntabilitas, sehingga banyak sekali terjadi penyalahgunaan keuangan, menurut saya ini bukan hanya di Melawi namun banyak terjadi di daerah lain,” katanya, beberapa waktu lalu.

Menurut Lutharif, masyarakat sangat sulit mengakses APBD, kondisi ini akhirnya membuat masyarakat menjadi sulit untuk memonitor setiap kegiatan pemerintah.

”Tahu-tahu muncul audit dari BPK dan ada laporan masyarakat berkenaan dengan korupsi,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah kasus di Melawi yang saat ini tengah ditangani kejaksaan adalah, kasus pembangunan kantor bupati, kasus pembangunan stadion, kasus pembangunan kantor inspektoran dan kasus PNNM, serta sejumlah kasus lain. (ali)